



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PUPUK INDONESIA GROUP  
**UNIT KERJA** : PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TENTAMINARTO TRI FEBRUARTONO**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **199131**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 14.076.659.158**

1. Bangunan Seluas 31 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN ,  
HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 2170 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI  
Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 760 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, WARISAN Rp.  
230.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 475 m2/300 m2 di KAB / KOTA  
BOYOLALI, WARISAN Rp. 185.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/146 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 514 m2/200 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
7. Bangunan Seluas 55 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN ,  
HASIL SENDIRI Rp. 1.420.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.361.659.158

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 420.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
170.000.000



2. MOBIL, TOYOTA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 210.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 170.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 657.756.426

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 15.534.415.584

III. HUTANG Rp. 3.613.302.342

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 11.921.113.242

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.